

PENGARUH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI ACEH

Raihan Maulida¹

raihanmaulida.lsm@gmail.com¹

Yeni Irawan²

irawanyeni1006@gmail.com²

Fakriah³

fakriah@pnl.ac.id³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Lhokseumawe

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Budget Surplus (SiLPA) and Local Own-Source Revenue (PAD) on Regional Expenditure of regency and municipal governments in Aceh Province, both partially and simultaneously. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from the Budget Realization Reports of regency and municipal governments in Aceh Province. The population consists of 23 regencies and municipalities observed during the 2020-2024 period, resulting in 115 observations. The data were analyzed using panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) through EViews 13. The result show that Budget Surplus (SiLPA) has no significant effect on Regional Expenditure, with a probability value of 0,7425. Meanwhile, Local Own-Source Revenue (PAD) has a positive and significant effect on Regional Expenditure, with a regression coefficient of 0,032352 and a probability value of 0,0052. Simultaneously, SiLPA and PAD have a significant effect on Regional Expenditure, as indicated by the Prob(F-statistic) value of 0,00000. The Adjusted R-squared value of 0,911097 indicates that 91,11% of the variation in Regional Expenditure can be explained by SiLPA and PAD, while the remaining 8,89% is explained by other factors outside the research model. The results indicate that PAD has a more dominant role in explaining changes in Regional Expenditure than SiLPA.

Keywords: [SiLPA], [Local Own-Source Revenue], [Regional Expenditure], [Panel Data Regression], [Aceh].

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintha Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, baik secara parsial maupun

simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Populasi penelitian terdiri atas 23 Kabupaten/Kota dengan periode pengamatan tahun 2020-2024, sehingga diperoleh 115 observasi. Analisis data dilakuakn menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) melalui EViews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, dengan nilai probabilitas sebesar 0,7425. Sementara itu, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,0000. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,911097 menunjukkan bahwa 91,11% variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh SiLPA dan PAD, sedangkan 8,89% lainnya dijelaskan oleh factor lain di luar model penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki peran yang lebih dominan dalam menjelaskan perubahan Belanja Daerah dibandingkan SiLPA.

Kata Kunci: [SiLPA], [Pendapatan Asli Daerah], [Belanja Daerah], [Regresi Data Panel], [Aceh].

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel penting untuk mendukung *good governance* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Accounting et al. (2023), kebijakan fiskal melalui APBD memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pendapatan dan mengalokasikan Belanja Daerah sesuai kebutuhan pembangunan. Defisit terjadi ketika pengeluaran pemerintah lebih

besar daripada pendapatannya dan dapat disebabkan oleh keterbatasan anggaran maupun metode pembiayaan (Novi et al., 2017).

Dalam konteks Provinsi Aceh, masih terdapat ketidakseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan realisasi Belanja Daerah yang terlihat dari tingginya SiLPA pada beberapa tahun anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian anggaran belum terserap secara optimal sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024, terlihat bahwa PAD setiap Kabupaten/Kota di Probinsi

Aceh mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Kota Banda Aceh secara konsisten memiliki PAD tertinggi dibandingkan daerah lainnya, sedangkan Kabupaten Gayo Lues, Simeulue, Aceh Singkil, dan Subulussalam memiliki PAD yang relatif lebih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masing-masing pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan masih berbeda-beda.

Menurut (Halim, 2014) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi daerah sendiri, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, besarnya PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Otonomi daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pemerintahannya secara mandiri. Dalam pengelolaan keuangan daerah, SiLPA dan PAD menjadi sumber pembiayaan Belanja Daerah, di mana SiLPA dapat digunakan pada tahun berikutnya, sedangkan PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah (Bank, 2021)

TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

Menurut Mardiasmo (2021), anggaran sektor public berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, koordinasi, pengukuran kinerja, dan pertanggungjawaban. Dalam

pengelolaan keuangan daerah, kemampuan fiskal dari PAD dan sumber pembiayaan seperti SiLPA berkaitan dengan kemampuan pemerintah membiayai belanja daerah.

Menurut Poerwanto (2017), anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan satuan moneter untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian, serta membantu meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Melalui anggaran, penggunaan dana dapat diarahkan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan..

2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Menurut Abdullah (2013) SILPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SILPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. SILPA diukur dengan cara menghitung selisih antara SILPA

setelah APBD dengan anggaran SiLPA dalam APBD murni.

Menurut Mardiasmo (2021), SiLPA berperan sebagai instrumen fleksibilitas fiskal yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pemanfaatan SiLPA diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa SiLPA dapat digunakan sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya. Sementara itu, PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya.

Menurut Elmia dan Arza (2020), keseimbangan fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja melalui sumber pendanaan yang tersedia. Secara sederhana, SiLPA dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SiLPA} = \text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan Neto}$$

Oleh karena itu, optimalisasi PAD dan pengelolaan SiLPA secara efektif diperlukan agar Belanja Daerah dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. SiLPA adalah sisa anggaran pada akhir tahun setelah memperhitungkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang dapat

digunakan sebagai sumber pembiayaan pada tahun berikutnya.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya. Peningkatan PAD memperkuat kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai Belanja Daerah.

Menurut Abdul Halim (2020), PAD berperan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah karena PAD yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah membiayai Belanja Daerah secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer. Oleh karena itu, optimalisasi PAD penting untuk meningkatkan pelayanan public dan mendukung Pembangunan daerah.

APBD merupakan instrumen keuangan daerah untuk merencanakan dan mengelola penerimaan serta pengeluaran dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut UU No. 84 Tahun 2023, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi,

transparansi, dan pemerataan (Nurmalita et al., 2025).

4. Belanja Daerah

Menurut Simamora (2014), Belanja Daerah merupakan pengeluaran dari kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan tidak diterima kembali oleh pemerintah daerah. Sementara itu,

Martunis dkk. (2014) menjelaskan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan infrastruktur.

Sementara itu, Anggraini dan Suhardjo (2010) membagi Belanja Daerah menjadi belanja tidak langsung, seperti belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, dan belanja tidak terduga, serta belanja langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh SiLPA dan PAD terhadap Belanja Daerah pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder sebanyak 115 observasi, yang

dianalisis menggunakan regresi data panel dengan EViews 13.0.

2. Populasi

Menurut Ghozali (2021), populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi fokus penelitian. Populasi penelitian ini berupa data keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2020–2024, yang mencakup pendapatan dan belanja daerah... Berikut merupakan tabel sampel penelitian:

Tabel 3.1 Populasi Penelitian

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1.	<u>Simelue</u>	13.	Gayo Lues
2.	Aceh <u>Singkil</u>	14.	Aceh <u>Tamiang</u>
3.	Aceh Selatan	15.	Nagan Raya
4.	Aceh Tenggara	16.	Aceh Jaya
5.	Aceh Timur	17.	<u>Bener Meriah</u>
6.	Aceh Tengah	18.	Pidie Jaya
7.	Aceh Barat	19.	Banda Aceh
8.	Aceh Besar	20.	Sabang
9.	Pidie	21.	Langsa
10.	<u>Bireun</u>	22.	Lhokseumawe
11.	Aceh Utara	23.	<u>Subussalam</u>
12.	Aceh Barat Daya		

Sumber: <https://jdih.acehprov.go.id>

Berdasarkan tabel 3.1 pemerintah daerah yang dijadikan Populasi pada penelitian ini ada 23 pemerintah daerah yang terdaftar di daftar pemerintahan Provinsi Aceh.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data numerik yang

terdiri dari *time series* dan *cross-section* (data panel). Data yang digunakan meliputi SiLPA, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Data diperoleh dari Laporan Realisasi APBD melalui BPK serta publikasi resmi pemerintah daerah dan BPS dengan metode dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020), statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan tanpa melakukan generalisasi.

Sementara itu, menurut Fayola dan Nurbaiti (2020), data panel merupakan gabungan data *time series* dan *cross section*. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk menguji hubungan antarvariabel penelitian.. Maka pada penelitian ini, analisis regresi dilakukan dengan metode analisis regresi data panel dengan model persamaannya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 SiLPA_{it} + \beta_2 PAD_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = Belanja Daerah pada daerah i pada periode t

α = Konstanta Regresi

β_1 = Koefisien Regresi variabel SiLPA

β_2 = Koefisien Regresi variabel PAD

$SiLPA_{it}$ = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada daerah i periode t

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah pada daerah i periode t

ϵ_{it} = Error Term

i = Cross-section (Kab/Kota)

t = time series (Periode Waktu Penelitian)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

a) Uji Chow

Kriteria Chow Test ditentukan berdasarkan nilai probabilitas *Cross-section F*. Jika Prob. < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Sebaliknya, jika Prob. $\geq$ 0,05, maka H_0 diterima sehingga model yang digunakan adalah Common Effect Model (CEM). Secara matematis, statistik Uji Chow dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{(RSS_{CEM} - RSS_{FEM}) / (N - 1)}{RSS_{FEM} / (N \times T - N - k)}$$

Keterangan:

RSS_{CEM} : Residual sum of squares model *Common Effect*

RSS_{FEM} : Residual sum of squares model *Fixed Effect*

N : Jumlah unit cross-section

T : Jumlah periode waktu

k : Jumlah variabel independen.

Tabel 4.1 Uji Chow untuk Menentukan CEM atau FEM

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	49.957298	(22,90)	0.0000
Cross-section Chi-square	296.827552	22	0.0000

Sumber: Hasi; olah data dengan Eviews 13.0

Probabilitas Cross-Section f sebesar $0,0000 < 0,05$ sehingga CEM ditolak dan FEM terpilih sebagai model akhir.

b) Uji Hausman

Kriteria pengujiannya yaitu jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka keputusan pengujian adalah menolak H_0 dan menerima H_a . Sebaliknya, jika nilai probabilitas $\geq 0,05$, maka H_0 diterima yang berarti model random effect lebih sesuai digunakan. Uji Hausman dirumuskan sebagai berikut:

$$H = (\beta_{FEM} - \beta_{REM})' [Var(\beta_{FEM}) - Var(\beta_{REM})]^{-1} (\beta_{FEM} - \beta_{REM})$$

Keterangan:

β_{FEM} : Vektor koefisien regresi *Fixed Effect Model*

β_{REM} : Vektor koefisien regresi *Random Effect Model*

$Var\beta$: Matriks varians-kovarians koefisien regresi

Tabel 4.2 Uji Hausman untuk Menentukan FEM atau REM

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: Untitled				
Test cross-section random effects				
Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. <u>d.f.</u>	Prob.
Cross-section random		17.551869	2	0.0002
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	<u>Var(Diff.)</u>	Prob.
LN_SILPA	0.001674	0.002866	0.000001	0.0976
LN_PAD	-0.032352	-0.029108	0.000001	0.0028

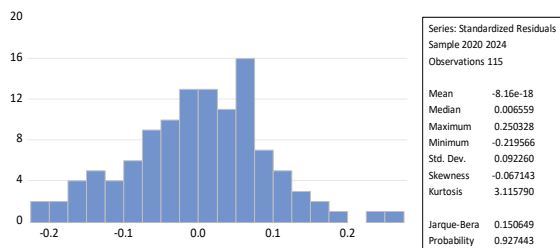
Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 13.0

Probabilitas Uji Hausman sebesar $0,0002 < 0,05$ sehingga REM ditolak dan FE< dipilih sebagai model akhir.

B. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal menggunakan Jarque-Bera Test. Jika Prob. JB $> 0,05$, maka residual dinyatakan berdistribusi normal.. Rangkuman hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:



Gambar 4.1 Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 13.0

Berdasarkan hasil Uji Normalitas pada Gambar 4.4, diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 0,150649 dengan nilai probabilitas (Probability) sebesar 0,927443. Nilai probabilitas tersebut $> 0,05$ ($0,927443 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinesritas

Uji multikolonieritas adalah untuk menguji apakah terdapat hubungan atau korelasi antara variabel independen (bebas) dalam model regresi. Nilai *cut off* yang digunakan adalah untuk nilai tolerance $\geq 0,10$ atau nilai $VIF \leq 10$. Rangkuman hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Asumsi Multikolineritas

Variance Inflation Factors			
Date: 08/08/26 Time: 21:33			
Sample: 1 115			
Included observations: 115			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
LN_SILPA	0.000164	96.05754	1.040875
LN_PAD	0.001042	776.3834	1.040875
C	0.760230	763.7855	NA

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 13.0

Diketahui bahwa variabel SiLPA memiliki nilai Centered VIF sebesar 1,040875, sedangkan variabel PAD juga memiliki nilai Centered VIF sebesar 1,040875. Nilai tersebut < 10 , sehingga menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolineritas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat perbedaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Apabila nilai probabilitas ditemukan lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: <u>Glejser</u>			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	0.070611	Prob. F(2,112)	0.9319
Obs*R-squared	0.144821	Prob. Chi-Square(2)	0.9301
Scaled explained SS	0.090465	Prob. Chi-Square(2)	0.9558

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 13.0

Berdasarkan Tabel 4.4, seluruh nilai probabilitas Prob.F, Obs*R-squared, dan Scaled Explained SS masing-masing sebesar 0,9319; 0,9301; dan 0,9558, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima, sehingga model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan residual memiliki varians yang konstan (*homoskedastisitas*).

C. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pengelolaan data menggunakan *software* Eviews 13.0, analisis regresi data panel dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independent telah dilakukan transformasi ke dalam bentuk logaritma natural (Ln), hal ini bertujuan agar data yang menilai besar ketika dianalisis lebih mudah dan stabil. Adapun hasil pengujian regresi data panel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Regresi Data Panel (Fixed Effect Model)

Dependent Variable: LN_BELANJA_DAERAH				
Method: Panel Least Squares				
Date: 08/08/26 Time: 15:47				
Sample: 2020 2024				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 23				
Total panel (balanced) observations: 115				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.60415	0.303657	94.19875	0.0000
LN_SILPA	0.001674	0.005080	0.329501	0.7425
LN_PAD	0.032352	0.011302	2.862571	0.0052
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.929814	Mean dependent var	27.76377	
Adjusted R-squared	0.911097	S.D. dependent var	0.348245	
S.E. of regression	0.103835	Akaike info criterion	-1.502372	
Sum squared resid	0.970349	Schwarz criterion	-0.905647	
Log likelihood	111.3864	Hannan-Quinn criter.	-1.260164	
F-statistic	49.67919	Durbin-Watson stat	1.529579	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 13.0

Berdasarkan hasil pemilihan model menggunakan Uji Chiw dan Uji Hausman dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

Dengan menggunakan model tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 28,60415 + 0,001674 X_1 + 0,032352 X_2 + \epsilon$$

Setelah statistik, nilai-nilai dalam persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (C) sebesar 28,60415 menunjukkan bahwa jika SiLPA

dan PAD bernilai nol, maka Belanja Daerah diperkirakan sebesar 28,60415.

2. Koefisien SiLPA sebesar 0,001674 menunjukkan pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Setiap kenaikan SiLPA 1% akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,001674%, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien PAD sebesar 0,032352 menunjukkan pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Setiap kenaikan PAD 1% akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,032352%, dengan asumsi variabel lain tetap.

D. Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atau pernyataan yang dapat diuji secara empiris mengenai hubungan dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian. Hipotesis disusun berdasarkan landasan teori, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran penelitian, dan berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengumpulan serta analisis data.

1. Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Daerah

Variabel SiLPA memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,001674, nilai t-statistic sebesar 0,329501, dan nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0,7425. Nilai

probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($0,7425 > 0,05$), sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Meskipun koefisien SiLPA positif, pengaruhnya tidak signifikan secara statistik, sehingga perubahan SiLPA belum mampu menjelaskan perubahan Belanja Daerah secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kebutuhan pembangunan, kebijakan fiskal, dan sumber pendapatan daerah.

2. Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Variabel PAD memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,032352, nilai t-statistic sebesar 2,862571, dan nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0,0052. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0052 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa setiap

peningkatan PAD cenderung meningkatkan belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan melalui belanja daerah.

3. Pengaruh SILPA dan PAD secara Simultan terhadap Belanja Daerah

Diperoleh nilai F-statistic sebesar 49,67919 dengan nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,000000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05 ($0,000000 < 0,05$). Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SiLPA dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan pada SiLPA dan PAD secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan belanja daerah. Artinya, dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh perlu memperhatikan pengelolaan SiLPA dan optimalisasi PAD karena kedua variabel tersebut secara kolektif memengaruhi

besarnya belanja daerah yang dialokasikan.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Dalam penelitian ini, koefisien determinasi dilihat melalui nilai Adjusted R-Square. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

R-squared	0.929814
Adjusted R-squared	0.911097

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 13.0

Nilai R-squared sebesar 0,929814 (92,98%) menunjukkan bahwa SiLPA dan PAD mampu menjelaskan 92,98% variasi Belanja Daerah, sedangkan 7,02% dipengaruhi faktor lain di luar model. Sementara itu, Adjusted R-squared sebesar 0,911097 (91,11%) menunjukkan bahwa setelah penyesuaian, SiLPA dan PAD masih mampu menjelaskan 91,11% variasi Belanja Daerah, sedangkan 8,89% dipengaruhi variabel lain.

Pembahasan

1) Penagruh SiLPA Terhadap Belanja Daerah

SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan koefisien 0,001674 dan probabilitas 0,7425. Meskipun koefisiennya positif, besarnya SiLPAbelum mampu menjelaskan perubahan Belanja Daerah secara nyata.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Susiana Marbun., dkk (2022) yang menyimpulkan bahwa SiLPA secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan secara simultan bersama variabel lain berpengaruh signifikan. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa SiLPA bukan merupakan faktor utama yang menentukan besarnya belanja daerah, karena pengalokasian belanja lebih dipengaruhi oleh keseluruhan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Uji F menunjukkan bahwa SiLPA dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, dengan nilai F-statistic 49,67919 dan Prob(F-statistic) 0,000000 < 0,05. Namun, secara parsial SiLPA tidak berpengaruh signifikan, sedangkan PAD berpengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian, signifikansi model secara simultan lebih

banyak didorong oleh PAD, yang memiliki kontribusi lebih besar terhadap perubahan Belanja Daerah dibandingkan SiLPA.

Secara keseluruhan, Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh lebih dipengaruhi oleh kemampuan pendapatan daerah dan dana transfer dibandingkan SiLPA. SiLPA lebih mencerminkan sisa atau belum optimalnya penyerapan anggaran tahun sebelumnya. Dengan demikian, hipotesis pertama (SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Daerah) ditolak.

2) Penagruh PAD Terhadap Belanja Daerah

PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dengan koefisien 0,032352 dan probabilitas 0,0052. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh PAD diikuti peningkatan kemampuan pembiayaan melalui Belanja Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siti Nurhalisa, A. Dahri Ai Patra LS., dan Jabbar Hamseng (2021) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD

akan meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah sehingga mendorong peningkatan belanja daerah.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Susiana Marbun., dkk (2022) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Menurut penelitian tersebut, semakin besar PAD yang diterima pemerintah daerah maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM) mengenai pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Aceh, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil uji t menunjukkan probabilitas $0,7425 > 0,05$, sehingga H_1 ditolak. Artinya, SiLPA bukan factor utama yang memengaruhi belanja daerah karena penggunaannya bergantung pada

kebijakan dan kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah.

- 2) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah. Hasil uji t menunjukkan probabilitas $0,0052 < 0,05$, sehingga H_2 diterima. Artinya, semakin besar PAD, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan public.
- 3) SiLPA dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh F-statistic sebesar 49,67919 dengan Prob(F-statistic) $0,000000 < 0,05$, sehingga H_3 diterima. Artinya, kedua variabel secara bersama-sama mampu memengaruhi perubahan belanja daerah.
- 4) Adjusted R-squared sebesar 0,911097 menunjukkan bahwa 91,11% variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh SiLPA dan PAD, sedangkan 8,89% dipengaruhi factor lain di luar model, seperti DAU, DAK, DBH, Dana Otonomi Khusus Aceh, dan kondisi ekonomi daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah Aceh, diperlukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan Belanja Daerah agar anggaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal. Besarnya SiLPA perlu menjadi bahan evaluasi karena dapat menunjukkan belum optimalnya penyerapan anggaran. Pemerintah Aceh perlu mempercepat pelaksanaan program dan meningkatkan pengawasan agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran agar nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tetap berada pada tingkat yang wajar. SiLPA yang terlalu besar dapat mengindikasikan rendahnya penyerapan anggaran atau belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap proses penganggaran dan pelaksanaan APBD.

- 2) Pemerintah Aceh juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, termasuk Dana Otsus, serta mengoptimalkan PAD sebagai sumber pembiayaan daerah. Permasalahan pengelolaan anggaran di Aceh menunjukkan bahwa persoalannya bukan semata-mata pada besarnya anggaran yang dimiliki Aceh, tetapi pada bagaimana anggaran tersebut direncanakan, direalisasikan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada program yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menghasilkan SiLPA akibat rendahnya penyerapan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Elmiza, E., & Arza, F.I. (2020). Pengaruh Faktor Finansial dan Faktor Non Finansial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2807-2825.
<https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.250>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM* (10th ed.). Badan Penerbit

- Universitas Diponegoro.
Semarang.
- Gorahe, I., Masinambow, V., & Engka, D. (2014). Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 14(3).
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marbun, Susiana., et al. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 17(1). ISSN:2085-1960.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Martunis., et al. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah: Analisis Perubahan APBD Kabupaten/Kota Se-Aceh. *JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI*. 7(1), 52-57.
- Mianto, A. P., & Priyadi, M. P. (2020). Pengaruh Flypaper Effect DAU, PAD, SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten atau Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 8(4), hal.1
- Nurhalisa, Sitti., A. Dahri Adi Patra Ls., & Jabbar Hamseng. (2020). Analisis Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Daerah (Study Pada BPKD Kabupaten Luwu).
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Fana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 185-189.